



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. LAMONGAN**

2023

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah, serta izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu, dengan harapan semoga nilai yang diperoleh akan lebih baik dari Tahun 2022. LKjIP ini disusun sebagai perwujudan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan *good government* menuju arah kinerja instansi pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel.

Dasar penyajian LKjIP Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Secara substansi LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan serta sebagai wujud komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*).

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Intansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. DATA UMUM ORGANISASI	5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN.....	63
LAMPIRAN	64
• MATRIKS RENCANA STRATEGIS	
• PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	
• PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
• LAMPIRAN LAINNYA (PENGHARGAAN, INOVASI DLL)	

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN.....	1
Tabel 1. Klasifikasi SDM Berdasarkan Status Kepegawaian	5
Tabel 2. Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan	5
Tabel 3. Klasifikasi SDM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	5
Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas PPPA	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
Tabel 5. Tujuan Perangkat Daerah	11
Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	12
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	19
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	23
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	24
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	26
Tabel 12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas PPPA	31
Tabel 13. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023	52
Tabel 14. Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategis, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2021-2026, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada Tahun 2023 telah direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Dinas dan staf Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan. di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama Tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu Tahun 2021-2026 akan difokuskan pada saran-saran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama indikator pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1.1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah wujud Pertanggungjawaban Pejabat Publik Kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing - masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah membawa dampak bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Prinsip - Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, yakni Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang *starting point* pada arah dan kebijakan bagi Pemberdayaan Perempuan melalui Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak berdasar Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta penghapusan KDRT berdasar Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dengan menyikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gab* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengendalian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pembinaan administrasi Dinas;
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

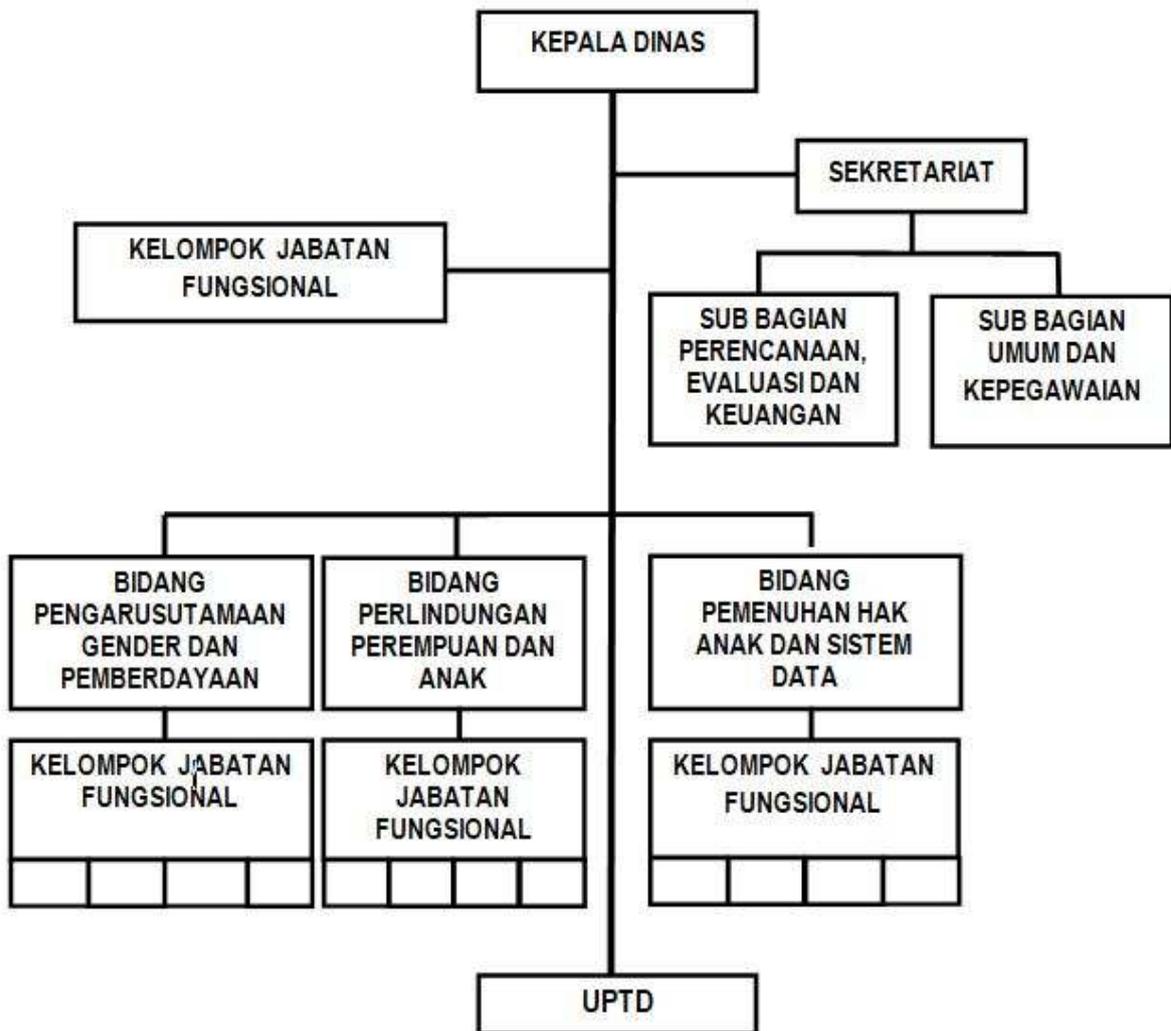
Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Membawahi kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data, membawahi kelompok jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini:

**GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
LAMONGAN**



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. KEPEGAWAIAN

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan hingga akhir Agustus Tahun 2023 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Klasifikasi SDM
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian**

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	19
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	21
	Total	40

**Tabel 2. Klasifikasi ASN
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	6
2	III	12
3	II	1
4	I	-
	Total	19

**Tabel 3. Klasifikasi SDM
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2	7	-	-	7
2	S1/D4	11	-	14	25
3	D3	1	-	2	3
4	SMA/Sederajat	1	-	4	5
5	SMP/Sederajat	-	-	1	1
	Total	20	-	21	41

2. SARANA DAN PRASARANA

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Dinas PPPA

NO	JENIS BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Bangunan Kantor	2	-	2
2	Roda Empat	4	-	4
3	Roda Dua	4	-	4
4	Komputer PC	22	1	23
5	Komputer Notebook	8	-	8
6	Printer	22	5	27
7	AC / Alat Pendingin	21	-	21
8	Meja Kerja Eselon II	1	-	1
9	Meja Kerja Eselon III	7	-	7
10	Meja Kerja Eselon IV	12	-	12
11	Meja Tamu	7	-	7
12	Meja Kerja Staff	5	2	7
13	Meja Rapat	1	-	1
14	Kursi Eselon II	3	-	3
15	Kursi Eselon III	9	0	9
16	Kursi Eselon IV	9	-	9
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	-	2
18	Kursi Rapat Ruangan Pejabat Eselon III	3	-	3
19	Kusi Rapat	127	-	127
20	Kursi Lipat	8	-	8
21	Kursi Tamu Ruang Pejabat	1	-	1
22	Layar Proyektor	1	-	1
23	LCD Proyektor	2	-	2
24	TV	1	-	1
25	CCTV	16	-	16
26	Almari	13	-	13
27	Rak Besi	1	-	1
28	Filling Cabinet	28	-	28
29	Almari Arsip	3	-	3
30	Penghancur Kertas	1	-	1
31	Mesin Absensi	1	-	1
32	Tempat Tidur Kayu	2	-	2
33	Meja Tulis	5	-	5
34	Vacum Cleaner	1	-	1

NO	JENIS BARANG	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
35	Lemari Es	1	-	1
36	Sound System	1	-	1
37	Camera	1	-	1
38	White board	1	-	1
39	Dispenser	3	-	3

Dari sarana prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk :

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran
2. Pendukung operasional layanan publik penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak :
 - Gedung Arsip
 - Toilet bagi pengunjung
 - Ruang PUSPAGA dan SHELTER
 - Ruang Tunggu bagi Pengunjung di Lengkapi Televisi dan Pendingin Ruangan
 - Tempat Parkir
 - Mushola
 - Kantin

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. DATA UMUM ORGANISASI
- D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP TAHUN 2023

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
- C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - A.1. Pencapaian Kinerja
 - A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
 - A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
 - A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan
 - A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- MATRIK RENCANA STRATEGIS (RS)
- PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2023
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- LAMPIRAN LAINNYA (PENGHARGAAN, INOVASI DLL)

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS**

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD 2021 – 2026 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah**
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman**
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan**
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram**
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi**

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, berada pada Misi ke 1 (satu) adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor unggulan daerah”

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator sasaran, adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni :

**Tabel 5. Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator	Tahun 2023	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	2	4	9	10
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,97	-

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, mempunyai sasaran strategis dan Indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 6. Sasaran Strategis dan Indikator kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023	
			Target (%)	Realisasi (%)
1	2	4	9	10
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	65,57 %	65,57 %
2	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan hak anak	14,77 %	16,67 %
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	39 %	56 %
		Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	55 %	71,43 %
4	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,63 %	86,95 %

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Untuk tercapainya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program dan kegiatan antara lain :

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan Kegiatan Antara Lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kegiatan Antara Lain :

- Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota
- Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten / kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota.

c. Program Perlindungan Perempuan dengan Kegiatan Antara Lain :

- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota
- Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota

d. Program peningkatan kualitas keluarga dengan Kegiatan Antara Lain:

- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota

f. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota

g. Program perlindungan khusus anak dengan Kegiatan Antara Lain:

- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud yang nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Tahun 2021-2026. Berikut Tabel Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023:

**Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	65.57%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	14.77%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	39%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	55%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.63

Sekretaris dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	89.55

BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kepala bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan perempuan produktif yang berperan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	4,50%
2	Meningkatnya perempuan yang berperan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga	Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga.	74%

BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA

Kepala bidang pemenuhan hak anak dan sistem data

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase forum anak yang terbentuk	14.77%
2	Meningkatnya data profil gender dan anak yang tersedia	Persentase tersedianya data profil data gender dan anak	60%

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

Kepala bidang perlindungan perempuan dan anak (ppa)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	39%
		Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	55%

Sub bagian umum dan kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya dengan baik	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	44 Paket
2	Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan pegawai dengan baik	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang
3	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket
4	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket
5	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket
6	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket
7	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	4 Dokumen
8	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan
9	Terpenuhinya pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit
10	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit
11	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan
12	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan
13	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
14	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit
15	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit
16	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit
17	Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
2	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan
3	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan
4	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Laporan
5	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Laporan

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

A.1. Pencapaian Kinerja

**Tabel 8. Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan
SASARAN 1	Meningkatnya pemberdayaan dan pendapatan masyarakat
TUJUAN PD	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
INDIKATOR TUJUAN PD	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	Indikator	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,97	-	-
SASARAN PD				
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan ❖ Meningkatnya pemenuhan hak anak ❖ Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak ❖ Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah 				
INDIKATOR SASARAN PD				
No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	65,57 %	65,57 %	100 %
2	Persentase Pemenuhan hak anak	14,77 %	16,67 %	112,86 %
3	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	39 %	56 %	143,58 %
4	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	55 %	71,43 %	129,87 %
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,63 %	86,95 %	100,37 %

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja Tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Adapun rincian Indikator Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator tujuan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2023 sebesar 73,97 % dan belum terealisasi menunggu data dari BPS.

Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)

Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) pada Tahun 2023 sebesar 65,57 % dan telah terealisasi sebesar 65,57 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.

Persentase Pemenuhan hak anak

Persentase Pemenuhan hak anak merupakan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Pemenuhan hak anak memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Pemenuhan hak anak pada Tahun 2023 sebesar 14,77 % dan telah terealisasi sebesar 16,67 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 112,86 %.

Persentase kasus kekerasan Perempuan yang diselesaikan

Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan pada Tahun 2023 sebesar 39 % dan telah terealisasi sebesar 56 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 143,58 %.

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan

Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2023 sebesar 55 % dan telah terealisasi sebesar 71,43 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 129,87 %.

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai sakip perangkat daerah merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nilai sakip perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Nilai Sakip Perangkat Daerah pada Tahun 2023 sebesar 86,63 % dan telah terealisasi sebesar 86,95 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100,37 %.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

**Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

TUJUAN PD			
No	Indikator kinerja	REALISASI	
		2022	2023
1	2	3	4
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	75,49 %	-

SASARAN PD			
No	Indikator kinerja	REALISASI	
		2022	2023
1	2	3	4
1	Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	65,37 %	65,57 %
2	Persentase Pemenuhan hak anak	12,66 %	16,67 %
3	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	78,95 %	56 %
4	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	75,56 %	71,43 %
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	86,62 %	86,95 %

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA INDIKATOR	Realisasi PD (2023)		Akhir Periode RPJMD/RENSTRA (2026)	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan.</p> $1/3 (lpar + IDM + linc-dist)$ <p>lpar = Indeks Keterwakilan di parlemen</p> <p>IDM = Indeks pengambilan keputusan</p> <p>linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	73,97 %	-	74,05 %	-

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	Realisasi PD (2023)		Akhir Periode RPJMD/RENSTRA (2026)	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 - 64}} \times 100$	65,57 %	65,57 %	66,17%	-
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan hak anak	$\frac{\text{Jumlah Forum Anak yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa di lamongan}} \times 100$	14,77 %	16,67 %	21,10%	-
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$	39 %	56 %	45 %	-
			Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$	55 %	71,43 %	70 %	-
		Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP DPPPA	Penilaian dari Inspektorat	86,62 %	86,95 %	82,70 %	-

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	Realisasi PD (2023)		Realisasi Nasional	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Jumlah perempuan usia 20 - 64}} \times 100$	65,57 %	65,57 %	-	-
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase pemenuhan hak anak	$\frac{\text{Jumlah Forum Anak yang terbentuk}}{\text{Jumlah desa di lamongan}} \times 100$	14,77 %	16,87 %	-	-
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$	39 %	56 %	-	-
			Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$	55 %	71,43 %	-	-
		Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP DPPPA	Penilaian dari Inspektorat	86,62 %	86,95 %	-	-

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang telah Dilakukan

Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam indikator sasaran program kerja. Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 antara lain :

- a. Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja.
- b. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan S1).
- c. Adanya struktur organisasi perangkat daerah dan pembagian tugas dari masing - masing bidang yang jelas.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing - masing bidang.
- e. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur.
- f. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Capaian kinerja pada tahun 2023 berdasarkan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan. Target yang telah ditetapkan yaitu 73,97 % dan belum terealisasi menunggu data dari BPS.

Capaian kinerja pada tahun 2023 berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik) pada Tahun 2023 sebesar 65,57 % dan telah terealisasi sebesar 65,57 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 100 %.
- b. Persentase Pemenuhan hak anak merupakan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase Pemenuhan hak anak memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Persentase Pemenuhan hak anak pada Tahun 2023 sebesar 14,77 % dan telah terealisasi sebesar 16,67 % sehingga telah tercapai target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 112,86 %.
- c. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan pada Tahun 2023 sebesar 39 % dan telah terealisasi sebesar 56 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 143,58 %
- d. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan pada Tahun 2023 sebesar 55 % dan telah terealisasi sebesar 71,43 % sehingga telah melebihi target yang telah ditentukan dan memperoleh capaian sebesar 129,87 %.

Nilai sakin perangkat daerah merupakan indikator sasaran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nilai sakin perangkat daerah memiliki target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026. Target Nilai sakin perangkat daerah pada Tahun 2023 sebesar 86,62 % dan telah terealisasi sebesar 86,95 % sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,37 %.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi PD dalam pembuatan dokumen PPRG belum maksimal
- b. Belum optimalnya peran perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) ditingkat Desa/Kelurahan dalam membantu menangani anak korban kekerasan
- c. Masih adanya stigma terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sehingga menghambat korban dalam mengakses bantuan dan layanan.
- d. Belum tersedianya Psikolog klinis dan Psikiater di Kabupaten Lamongan untuk pemeriksaan Visum et-Repertum Psychiatricum (VeRp) bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- e. Penyusunan Dokumen Profil Gender dan Anak belum maksimal.
- f. Pembentukan Forum Anak yang belum maksimal dan kurang pahami masyarakat terhadap Forum Anak.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dengan PD dalam pembuatan dokumen PPRG
- b. Menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi perangkat daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga/Organisasi Masyarakat.
- c. Melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan.
- d. Melakukan Refreshment terkait pemahaman dalam pembelajaran system satu data lamongan.

- e. Melakukan penerapan indikator Kabupaten Layak Anak dalam kegiatan sehari-hari pemerintah kabupaten Lamongan.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dan dituangkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang penjabaran operasional rencana tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Lamongan dan sesuai dengan VISI dan MISI Bupati Lamongan Tahun 2021-2026. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu perangkat daerah berdasarkan kewenangannya adalah penyelenggara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah Kabupaten yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

Tabel 12. Analisis Efisiensi Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	89,55%	89,64 %	3.989.105.000	3.788.799.410	94,98	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	42.600.000	42.124.500	98,88	√	√	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000	20.814.500	99,12	√	√	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	21.600.000	21.310.000	98,66	√	√	
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	2.714.668.000	2.537.565.966	93,48	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	2.684.668.000	2.507.631.966	93,41	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	14.934.000	99,56	√	√	

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD								
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	100,00	√	√	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100%	100%	25.040.000	25.040.000	100,00	√	√	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	44 Paket	44 Paket	23.100.000	23.100.000	100,00	√	√	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	4 Orang	1.940.000	1.940.000	100,00	√	√	
Administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	152.261.800	152.049.800	99,86	√	√	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	15.000.000	14.998.900	99,99	√	√	

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	6 Paket	19.651.800	19.645.900	99,97	√	√	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	30.000.000	30.000.000	100,00	√	√	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	6 Paket	16.000.000	15.996.500	99,98	√	√	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	13.800.000	13.740.000	99,57	√	√	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	57.810.000	57.668.500	99,76	√	√	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	57.321.300	57.321.000	100,00	√	√	
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	19.262.500	19.262.200	100,00	√	√	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	8 unit	38.058.800	38.058.800	100,00	√	√	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	100%	568.816.000	562.236.567	98,84	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	84.000.000	82.913.287	98,71	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	7.000.000	6.990.000	99,86	√	√	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	477.816.000	472.333.280	98,85	√	√	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	296.042.100	289.833.890	97,90	√	√	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	2 unit	67.259.600	66.940.000	99,52	√	√	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 unit	6 unit	28.432.500	23.095.100	81,23	√	√	Tidak terserap karna Realisasi berdasarkan kebutuhan

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit	5.000.000	5.000.000	100,00	√	√	
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	3 unit	195.350.000	194.798.790	99,72	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEREMPUAN PRODUKTIF YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN (EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK)	4.50 %	4.50 %	293.117.500	293.117.500	100,00	√	√	
Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga	Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi	61 lembaga	61 lembaga	41.482.000	41.482.000	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
pemerintah kewenangan kabupaten/kota	PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG								
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	61 Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah	41.482.000	41.482.000	100,00	√	√	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina	2 Organisasi	2 Organisasi	207.150.700	207.150.700	100,00	√	√	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	2 Dokumen	2 Dokumen	105.750.700	105.750.700	100,00	√	√	
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi	2 Organisasi	2 Organisasi	101.400.000	101.400.000	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
	perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi								
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	44.484.800	44.484.400	100,00	√	√	
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	110 Orang	110 Orang	44.484.400	44.484.400	100,00	√	√	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE PEREMPUAN YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA	74%	74%	99.760.000	99.750.000	99,99	√	√	
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/	Jumlah keluarga yang dibina	260 Keluarga	260 Keluarga	99.760.000	99.750.000	99,99	√	√	
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk	2 laporan	2 laporan	99.760.000	99.750.000	99,99	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
kewenangan kabupaten / kota	peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota								
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PERSENTASE FORUM ANAK YANG TERBENTUK	14,77%	16,67%	473.192.200	473.135.500	99,99	√	√	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	40 Lembaga	40 Lembaga	228.192.200	228.147.700	99,98	√	√	
Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	494 Organisasi	494 Organisasi	228.192.200	228.147.700	99,98	√	√	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak	35 Lembaga	35 Lembaga	245.000.000	244.987.800	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	4 Dokumen	4 Dokumen	245.000.000	244.987.800	100,00	√	√	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE TERSEDINYA DATA PROFIL GENDER DAN ANAK	60%	60%	36.076.850	36.076.850	100,00	√	√	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	35 Data	35 Data	36.076.850	36.076.850	100,00	√	√	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten / kota yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	36.076.850	36.076.850	100,00	√	√	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN	39%	56,00%	191.087.150	191.087.150	100,00	√	√	
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Lembaga	7 Lembaga	62.400.000	62.400.000	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Dokumen	5 Dokumen	62.400.000	62.400.000	100,00	√	√	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	7 kasus	11 kasus	84.277.150	84.277.150	100,00	√	√	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 layanan	7 layanan	84.277.150	84.277.150	100,00	√	√	
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga	7 lembaga	7 lembaga	44.410.000	44.410.000	100,00	√	√	
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	75 Peserta	75 Peserta	44.410.000	44.410.000	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE KASUS KEKERASAN ANAK YANG DISELESAIKAN	55%	71,43%	269.123.300	269.123.300	100,00	√	√	
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	12,35%	12,35%	152.812.800	152.812.800	100,00	√	√	
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Dokumen	5 Dokumen	152.812.800	152.812.800	100,00	√	√	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	16 kasus	30 Kasus	96.310.500	96.310.500	100,00	√	√	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	7 Layanan	7 Layanan	45.310.500	45.310.500	100,00	√	√	
Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan	2 Dokumen	2 Dokumen	51.000.000	51.000.000	100,00	√	√	

URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN			EFEKTIF	EFISIEN	KETERANGAN ≤ 90%
		TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI				
5	6	7	8						
yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota								
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase SDM mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3,69%	3,69%	20.000.000	20.000.000	100,00	√	√	
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	100,00	√	√	

A.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.856.749.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.666.171.723,- atau sebesar 95,06 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 42.600.000 dipergunakan untuk memenuhi perencanaan dan evaluasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 42.124.500 atau 98,88 % dan fisik 100 %.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 21.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.814.500 atau 99,12 % dan fisik 100 %.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 21.600.000 dipergunakan untuk memenuhi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 21.310.000 atau 98,66 % dan fisik 100 %.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 2.714.668.000 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.537.565.966 atau 93,48 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi Rp. 2.684.668.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.507.631.966 atau 93,41 % dan fisik 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.934.000 atau 99,56 % dan fisik 100 %.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 25.040.000 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.040.000 atau 100% dan fisik 100 %.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya dengan alokasi Rp. 23.100.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.100.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi 1.940.000 dipergunakan untuk memenuhi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.940.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 152.261.800 dipergunakan untuk memenuhi Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 152.049.800 atau 99,86% dan fisik 100 %.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi Rp. 15.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.998.900 atau 99,99 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi Rp. 19.651.800 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.645.900 atau 99,97 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi Rp. 30.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi Rp. 16.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.996.500 atau 99,98 % dan fisik 100 %.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi Rp. 13.800.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.740.000 atau 99,57 % dan fisik 100 %.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 57.810.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 57.668.500 atau 99,76 % dan fisik 100 %.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi Rp. 57.321.300 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 57.321.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Pengadaan Mebel dengan alokasi Rp. 19.262.500 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Mebel. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 19.262.200 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 38.058.800 dipergunakan untuk memenuhi Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 38.058.800 atau 99,71 dan fisik 100 %
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 568.816.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 562.236.567 atau 98,84 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi Rp. 84.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 82.913.287 atau 98,71 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi Rp. 7.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Peralatan dan

- Perlengkapan Kantor Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.990.000 atau 99,86 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi Rp. 477.816.000 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 472.333.280 atau 98,85 % dan fisik 100 %.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi Rp. 296.042.100 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 289.833.890 atau 97,90 % dan fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi Rp. 67.259.600 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 66.940.000 atau 99,52 % dan fisik 100 %.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi Rp. 28.432.500 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.095.100 atau 81,23 % dan fisik 100 %.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi Rp. 5.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi Rp. 195.350.000 dipergunakan untuk memenuhi Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 194.798.790 atau 99,72 % dan fisik 100 %.

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.117.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 293.117.500 atau sebesar 100,00 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 41.482.000 dipergunakan untuk memenuhi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 41.482.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan alokasi Rp. 41.482.000 dipergunakan untuk memenuhi Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 41.482.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 207.150.700 dipergunakan untuk memenuhi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 207.150.700 atau 100,00 % dan fisik 100 %.
 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan alokasi Rp. 105.750.700 dipergunakan untuk memenuhi Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 105.750.700 atau 100 % dan fisik 100 %.
 - Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan alokasi Rp. 101.400.000 dipergunakan untuk memenuhi Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 101.400.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 44.484.800

dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.484.800 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 44.484.800 dipergunakan untuk memenuhi Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.484.800 atau 100 % dan fisik 100 %.

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.760.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000 atau sebesar 99,99 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.760.000 dipergunakan untuk memenuhi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000 atau sebesar 99,99 % dan fisik 100 %.

- Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.760.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 99.750.000 atau sebesar 99,99 % dan fisik 100 %.

4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 473.192.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 473.135.500 atau sebesar 99,99 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 228.192.200 dipergunakan untuk memenuhi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah ,

Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 228.147.700 atau 99,98% dan fisik 100 %.

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 228.192.200 dipergunakan untuk memenuhi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 228.147.700 atau 99,98 % dan fisik 100 %.
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 245.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 244.987.800 atau 100,00 % dan fisik 100 %.
- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 245.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 244.987.800 atau 100,00 % dan fisik 100 %.

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.076.850 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.076.850 atau sebesar 100 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 36.076.850 dipergunakan untuk memenuhi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 36.076.850 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 36.076.850 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 36.076.850 atau 100 % dan fisik 100 %.

6. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.087.150 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.087.150 atau sebesar 100 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 62.400.000 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 62.400.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 62.400.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 62.400.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 84.277.150 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.277.150 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan alokasi Rp. 84.277.150 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.277.150 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 44.410.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan pengembangan Lembaga

Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.410.000 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 44.410.000 dipergunakan untuk memenuhi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 44.410.000 atau 100 % dan fisik 100 %.

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.123.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 269.123.300 atau sebesar 100 % adapun rincian kegiatan penggunaan anggaran sebagai berikut :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 152.812.800 dipergunakan untuk memenuhi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 152.812.800 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 152.812.800 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 152.812.800 atau 100 % dan fisik 100 %.
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi Rp. 96.310.500 dipergunakan untuk memenuhi Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 96.310.500 atau 100% dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota. dengan alokasi Rp. 45.310.500 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45.310.500 atau 100 % dan fisik 100 %.

- Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 51.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 51.000.000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.0000 atau 100 % dan fisik 100 %.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi Rp. 20.000.000 dipergunakan untuk memenuhi Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000 atau 100 % dan fisik 100 %.

Tabel 13. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2023

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM PERANGKAT DAERAH	89,55%	89,64 %	100 %
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	daerah			
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	3 Laporan	100 %
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100 %	100 %	100 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	44 Paket	44 Paket	100 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	4 Orang	100 %
Administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	100 %
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	100 %
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	100 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	6 Paket	6 Paket	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	penggandaan yang disediakan			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	100 %
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100 %	100 %	100 %
Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	100 %
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	8 unit	100 %
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	100 %
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100 %
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100%	100%	100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	2 unit	100 %
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 unit	6 unit	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	5 Unit	100 %
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	3 unit	100 %
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEREMPUAN PRODUKTIF YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN (EKONOMI, SOSIAL DAN POLITIK)	4.50 %	4.50 %	100 %
Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	61 lembaga	61 lembaga	100 %
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	61 Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah	100 %
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan di bidang pemberdayaan perempuan yang dibina	2 Organisasi	2 Organisasi	100 %
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten / kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Organisasi	2 Organisasi	100 %
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan yang dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
kewenangan kabupaten/kota				
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota yang mendapat peningkatan kapasitas	110 Orang	110 Orang	100 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE PEREMPUAN YANG BERPERAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP KELUARGA	74%	74%	100 %
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/	Jumlah keluarga yang dibina	260 Keluarga	260 Keluarga	100 %
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	2 laporan	2 laporan	100 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	PERSENTASE FORUM ANAK YANG TERBENTUK	14,77%	16,67%	112,86 %
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Satuan Pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak	40 Lembaga	40 Lembaga	100 %
Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	494 Organisasi	494 Organisasi	100 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak	35 Lembaga	35 Lembaga	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE TERSEDINYA DATA PROFIL GENDER DAN ANAK	60%	60%	100 %
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	35 Data	35 Data	100 %
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten / kota yang tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN YANG DISELESAIKAN	39%	56 %	143,58 %
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Lembaga	7 Lembaga	100 %
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	7 kasus	11 kasus	100 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	7 layanan	7 layanan	100 %
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga	7 lembaga	7 lembaga	100 %

URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	75 Peserta	75 Peserta	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE KASUS KEKERASAN ANAK YANG DISELESAIKAN	55%	71,43%	129,87 %
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan pelatihan kapasitas layanan	12,35%	12,35%	100 %
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	16 kasus	30 Kasus	187,5 %
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	7 Layanan	7 Layanan	100 %
Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase SDM mengikuti kegiatan penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3,69%	3,69%	100 %
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Dari ke 7 (tujuh) program utama yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 realisasi pencapaian kinerja program telah mencapai 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 14. Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran	Realisasi	
	Jumlah	Jumlah	%
1	2	3	4
<u>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</u>	<u>3.856.749.200</u>	<u>3.666.171.723</u>	<u>95,06</u>
<u>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</u>	<u>1.362.357.000</u>	<u>1.362.290.300</u>	<u>99,99</u>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.856.749.200	3.666.171.723	95,06
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42.600.000	42.124.500	98,88
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	21.000.000	20.814.500	99,12
Evaluasi kinerja perangkat daerah	21.600.000	21.310.000	98,66
Administrasi keuangan perangkat daerah	2.714.668.000	2.537.565.966	93,48
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.684.668.000	2.507.631.966	93,41
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15.000.000	14.934.000	99,56
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100,00
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	25.040.000	25.040.000	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	23.100.000	23.100.000	100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.940.000	1.940.000	100,00
Administrasi umum perangkat daerah	152.261.800	152.049.800	99,86
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	14.998.900	99,99
Penyediaan peralatan rumah tangga	19.651.800	19.645.900	99,97
Penyediaan bahan logistik kantor	30.000.000	30.000.000	100,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.000.000	15.996.500	99,98
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.800.000	13.740.000	99,57
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	57.810.000	57.668.500	99,76
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	57.321.300	57.321.000	100,00
Pengadaan mebel	19.262.500	19.262.200	100,00
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	38.058.800	3.805.800	10,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	
	Jumlah	Jumlah	%
1	2	3	4
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	568.816.000	562.236.567	98,84
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	84.000.000	82.913.287	98,71
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000	6.990.000	99,86
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	477.816.000	472.333.280	98,85
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	296.042.100	289.833.890	97,90
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	67.259.600	66.940.000	99,52
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	28.432.500	23.095.100	81,23
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	195.350.000	194.798.790	99,72
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	293.117.500	293.117.500	100,00
Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	41.482.000	41.482.000	100,00
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	41.482.000	41.482.000	100,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	207.150.700	207.150.700	100,00
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	105.750.700	105.750.700	100,00
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	101.400.000	101.400.000	100,00
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	44.484.800	44.484.400	100,00
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	44.484.400	44.484.400	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99.760.000	99.750.000	99,99
Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/	99.760.000	99.750.000	99,99
Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota	99.760.000	99.750.000	99,99
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	473.192.200	473.135.500	99,99
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	228.192.200	228.147.700	99,98
Advokasi kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	228.192.200	228.147.700	99,98
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	245.000.000	244.987.800	100,00
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	245.000.000	244.987.800	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.076.850	36.076.850	100,00
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	36.076.850	36.076.850	100,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	
	Jumlah	Jumlah	%
1	2	3	4
Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	36.076.850	36.076.850	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	191.087.150	191.087.150	100,00
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	62.400.000	62.400.000	100,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	62.400.000	62.400.000	100,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi	84.277.150	84.277.150	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	84.277.150	84.277.150	100,00
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten / kota	44.410.000	44.410.000	100,00
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	44.410.000	44.410.000	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	269.123.300	269.123.300	100,00
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten / kota	152.812.800	152.812.800	100,00
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	152.812.800	152.812.800	100,00
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.310.500	96.310.500	100,00
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	45.310.500	45.310.500	100,00
Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	51.000.000	51.000.000	100,00
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	20.000.000	20.000.000	100,00
Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten / kota	20.000.000	20.000.000	100,00
JUMLAH	5.219.106.200	5.028.462.023	96,35

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2023 baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dikategorikan sangat berhasil (realisasi anggaran 96,35 % dan realisasi fisik 100 %). Hal ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = Sangat Baik/ Berhasil). Pencapaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Ini artinya kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. SARAN

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara Operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bekerjasama dengan lembaga, organisasi maupun perkumpulan perempuan untuk melakukan pendampingan mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
2. Meningkatkan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program;
3. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.

Lamongan, Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010

LAMPIRAN

- Matrik Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Penghargaan DLL

MATRIKS RENCANA STRATEJIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. TABEL MATRIK TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p style="text-align: center;">$1/3 (I_{par} + I_{DM} + I_{linc-dist})$</p> <p>I_{par} = Indeks Keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan I_{linc-dist} = Indeks distribusi pendapatan</p>	74,05 %	73,97 %	75,49	73,99	-	74,01	-	74,03	-	74,05	-	74,05	-

2. TABEL MATRIK SASARAN

Sasaran		Rumus	Kondisi Awal Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi akhir	
Uraian	Indikator Kinerja			Target	Realisasi	Target	Realisasi								
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran serta perempuan dalam pembangunan (ekonomi, sosial dan politik)	Jumlah Perempuan Yang Bekerja dibagi Jumlah perempuan Usia 20 – 64 dikali 100	-	65,37%	65,37%	65,57%	65,57%	65,77%	-	65,97%	-	66,17%	-	66,17%	-
Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase Pemenuhan hak anak	Jumlah forum anak yang ada di Lamongan dibagi Jumlah desa di lamongan dikali 100	-	12,66%	12,66%	14,77%	16,67%	16,88%	-	18,99%	-	21,10%	-	21,10%	-
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan dikali 100	60 %	37 %	78,95 %	39 %	56 %	41 %	-	43 %	-	45 %	-	45 %	-
	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan kasus kekerasan anak dikali 100	55,56 %	50 %	75,56 %	55 %	71,43 %	60 %	-	65 %	-	70 %	-	70 %	-
Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian dari Inspektorat	-	82.30	86,62	82.40	86.95	82.50	-	82.60	-	82.70	-	82.70	-

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN IV TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada tribulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2021** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan administrasi Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Bupati Lamongan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 4 (empat) sasaran kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV :

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	65,57 %	65,41%	65,47%	65,52%	65,57%	65,41% (282.495/ 431.858) *100	65,47% (282.720/ 431.858) *100	65,52% (282.945/431.858)*100	65,57% (283.170/431.858)*100	65,57%	100%
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	14,77 %	-	14,77%	-	-	-	16,67% (79/474) *100	-	-	16,67%	112,86%
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	39%	9%	24%	36%	39%	28,57% (2/7)*100	33,33% (5/15) *100	50% (11/22)*100	56% (14/25)*100	56% (14/25)*100	143,59%
	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	55%	10%	25%	40%	55%	28,57% (2/7)*100	21,21% (7/33)*100	36,84% (14/38)*100	71,43% (30,42)*100	71,43% (30,42)*100	129,87%
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,63	-	-	-	86,63	-	-	-	86,95	86,95	100,37 %

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Program	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	293.117.500	0	1.321.000	187.893.600	103.902.900	-	1.321.000	187.893.600	103.902.900	293.117.500	100%
2	Program peningkatan kualitas keluarga	99.760.000	0	40.440.300	59.309.700	10.000	-	40.440.300	59.309.700	0	99.750.000	99.99%
3	Program pemenuhan hak anak	473.192.200	0	93.866.450	67.171.200	312.154.550	-	93.866.450	67.171.200	312.097.850	473.135.500	99.99%
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	36.076.850	650.000	19.776.850	0	15.650.000	650.000	19.776.850	0	15.650.000	36.076.850	100%
5	Program perlindungan perempuan	191.087.150	28.085.150	72.333.700	31.537.250	59.131.050	28.085.150	72.333.700	31.537.250	59.131.050	191.087.150	100%
6	Program perlindungan khusus anak	269.123.300	12.635.350	29.447.300	22.294.350	204.746.300	12.635.350	29.447.300	22.294.350	204.746.300	269.123.300	100%
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.856.749.200	707.591.673	1.226.499.241	831.386.972	1.091.271.314	707.591.673	1.226.499.241	831.386.672	900.694.137	3.666.171.723	95.06%
JUMLAH		5.219.106.200	748.962.173	1.483.684.841	1.199.592.772	1.786.866.114	748.962.173	1.483.684.841	1.199.592.772	1.596.222.237	5.028.462.023	96.35%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan Indikator Kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan pada dengan target kinerja sebesar 65,57% pada tribulan IV sudah terealisasi sebesar 65,57 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Hak Anak pada dengan target kinerja sebesar 14,77% pada tribulan II sudah terealisasi sebanyak 16.67% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 112.86%.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Indikator Kinerja Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 39% telah terealisasi pada tribulan IV sebesar 56%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 143.59%.
 - b. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 59% telah terealisasi pada tribulan IV sebesar 71.43%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 129.87%.
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja 86.63 pada tribulan IV dan telah terealisasi pada tribulan IV sebesar 86,95% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,37%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan akan ditingkatkan dengan sosialisasi/bimtek/pelatihan perempuan sehingga mampu memperkecil perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta peran gender terbagi menjadi peran produktif. ;
2. Guna meningkatnya indikator kinerja persentase pemenuhan hak anak akan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pembentukan forum anak sampai dengan tingkat desa;
3. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak ;

4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Lamongan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan IV Tahun 2023:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 65,57%, realisasi pada tribulan IV sebesar 65,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100% untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan IV;.
3. Persentase Pemenuhan Hak Anak sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 14,77% pada tribulan II sudah terealisasi sebanyak 16.67% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 112.86%.
4. Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 39%, realisasi tribulan IV sebesar 56% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 143.59% untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan IV. Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan rata-rata sudah tercapai dari perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 55%, realisasi tribulan IV sebesar 71.43% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 129.87%
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan dari target tahunan sebesar 86.63 dan telah terealisasi pada tribulan IV sebesar 86,95% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,37%.

Lamongan, 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



UMURONAH, S.ST.,M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19721111 199203 2 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UMURONAH, S.ST.,M.Kes**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Desember 2023

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**



Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST.,M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	65.57%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pemenuhan Hak Anak	14.77%
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan	39%
		Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	55%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86.63

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.856.749.200,-	APBD
2 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 293.117.500,-	APBD
3 Perlindungan Perempuan	Rp. 191.087.150,-	APBD
4 Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 99.760.000,-	APBD
5 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 36.076.850,-	APBD
6 Pemenuhan Hak Anak	Rp. 473.192.200,-	APBD
7 Perlindungan Khusus Anak	Rp. 269.123.300,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN	Rp. 5.219.106.200,-	+ APBD

Lamongan, Desember 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN



D. MUHONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN



UMURONAH, S.ST., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010

**PENGHARGAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**





BUPATI LAMONGAN
PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor : 000.5.15.1/171/413.122/2023

Diberikan Kepada :

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam Rangka Audit Kearsipan Internal Tahun 2023
Dengan Nilai 82,54 **A (MEMUASKAN)**



BUPATI LAMONGAN



Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**INOVASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023**

SPIKER PERAK "Sistem Pengaduan Online Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak"

Sebagai media pelayanan dan pengaduan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan, misalnya perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran serta eksploitasi anak yang dapat diakses secara cepat melalui media daring. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak kekerasan pada Perempuan dan Anak, antara lain yaitu faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, kemajuan teknologi dan komunikasi serta faktor lingkungan.

Inovasi ini muncul untuk menyukseskan program *Three Ends*, yaitu :

1. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Mengakhiri perdagangan manusia; dan
3. Mengakhiri kesenjangan ekonomi.

Ketiga masalah yang menjadi isu daerah yang belum terselesaikan dan inovasi ini dibuat sebagai upaya /solusi dalam penyelesaian isu daerah yang ada.

